

ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPONEN *SMART VILLAGE* DI DESA LIMPUNG

Ananda Haniyuhana^{1(a)}, Ary Setyo Wicaksono^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
^{a)}haniyuhana@gmail.com, ^{b)}ary.setyo@staffupnjatim.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

04-01-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2023

Kata Kunci:

Kebijakan Publik,
Implementasi Kebijakan,
Smart Village

Keywords:

Public Policy, Policy
Implementation, Smart Village

Corresponding Author:

ary.setyo@staffupnjatim.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.573>

ABSTRAK

Smart village adalah pengembangan konsep yang menekankan bahwa masyarakat desa yang berada di dalam komunitas tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat budaya setempat, dan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu saja konsep *smart village* tentu tidak akan lepas dari lima komponen utama yaitu *smart governance*, *smart environment*, *smart economy*, *smart mobility*, dan *smart tourism*. Sebagai salah satu Desa yang menerapkan Program *smart village*, Desa Limpung sebagai salah satu desa percobaan implementasi program *smart village* di Kabupaten Batang memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di pada penerapan program *smart village* ini yang dapat ditinjau berdasarkan lima komponen utama konsep *smart village*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan komponen *smart village* pada Implementasi Program *smart village* di Desa Limpung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data... Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen *smart village* sudah diterapkan pada Program *Smart Village* di Desa Limpung, Kecamatan Limpung, kabupaten Batang.

ABSTRACT

Smart village is the development of a concept where village people are in a community that solves regional problems by utilizing their potential resources intelligently, wisely and efficiently and elevating local customs and culture, as well as applicable norms. Based on this explanation, of course the concept of a smart village cannot be separated from the five main components, namely *smart governance*, *smart environment*, *smart economy*, *smart mobility*, and *smart tourism*. As one of the villages implementing the smart village program, Limpung Village as one of the pilot villages for the implementation of the smart village program in Batang Regency has several problems that occur in implementing the smart village program which can be reviewed based on the five main components of the smart village concept. This research aims to determine the implementation of the smart village component in the implementation of the smart village program in Limpung Village. The method used in this study is a descriptive qualitative research method with data collection.

PENDAHULUAN

Menurut (Wiswanadham, 2010) *smart village* diartikan sebagai layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakatnya secara efektif dan efisien. Desa pintar atau *smart village* adalah *Smart village* juga dapat diartikan sebagai pengembangan konsep yang menekankan bahwa masyarakat desa yang berada di dalam komunitas tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat budaya setempat, dan norma-norma yang berlaku (Baru, Djunaedi, & Herwangi, 2019).

Selanjutnya dasar pengembangan *smart village* juga tidak hanya memiliki fokus dalam menerapkan kecanggihan teknologi di suatu desa saja, melainkan merujuk pula dalam menciptakan perubahan situasi desa menjadi lebih berkualitas dan sejahtera dengan cara memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya dengan berkelanjutan. Konsep *smart village* kemudian dapat diartikan juga sebagai suatu kesatuan yang tidak terlepas dari pengembangan konsep *smart city*. Hanya saja dalam konsep *smart village* akan berfokus pada unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan yaitu pada wilayah desa. Sebab sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memerlukan pula suatu pengembangan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Aditama, 2018).

Wilayah desa dengan karakteristik budaya dan masyarakat yang homogeny adalah menjadi alasan tersendiri bagi pengembangan wilayah desa yang kemudian tidak memungkinkan untuk disamakan akan lingkup perkembangan pada kota. Sehingga dalam menerapkan pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan konstruksi konseptual dasar dalam karakteristik wilayah desa, maka dengan seperti ini desa dapat menciptakan sinergitas diantara pemerintah, masyarakat dan lingkungan secara mendasar berdasarkan nilai, karakter serta norma yang dimiliki desa (Herdiana, 2019). Suatu konsep *smart village* (desa pintar) dapat menjadi solusi dalam mengatasi banyaknya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini dilakukan dengan cara adopsi komponen

smart city, sehingga menjadi hal yang tidak mustahil bagi desa untuk memunculkan kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, sumber daya manusia unggul dan berkualitas, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan hidup dan sosial yang sehat (Baru, Djunaedi, & Herwangi, 2019).

Desa Limpung menjadi salah satu desa percontohan (*pilot project*) implementasi program *smart village* di Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang ada dinyatakan bahwa sumber daya manusia maupun akses internet sudah memadai bagi penerapan *smart village* di Desa Limpung. Pertimbangan lain yang menjadikan Desa Limpung menjadi salah satu desa percontohan atau desa induk implementasi *smart village* dikarenakan Desa Limpung merupakan salah satu desa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Limpung. Sehingga dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Limpung ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pengembangan komponen *smart village* pada implementasi program *smart village* di Desa Limpung. Sehingga dapat diketahui dengan adanya potensi yang dimiliki Desa Limpung ini akan mengotimalkan atau pun tidak memiliki pengaruh signifikan pada pengembangan program *smart village* di Desa Limpung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif sehingga tidak bisa diwakilkan dengan angka/statistika. Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan memuat penjelasan lebih rinci yang disesuaikan dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti juga bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu permasalahan pada implementasi *smart village* yang dilihat dari konsep *smart village* dengan lima fokus utama yang akan diteliti diantaranya adalah *smart governance*, *smart environment*, *smart economy*, *smart mobility*, dan *smart tourism*. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik penarikan informan berupa *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

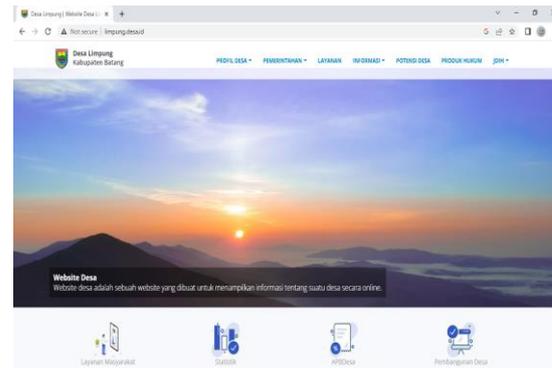
Berdasarkan hasil penelitian yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat dilihat analisis penerapan komponen *smart village* di Desa Limpung sebagai berikut:

Smart Governance

Komponen *smart governance* pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yang ada di dalamnya, diantaranya adalah; pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa (Santoso et al., 2019;Herdiana, 2019; Subekti & Damayanti, 2019;dan Rachmawati, 2018). Pada implementasinya, *smart governance* diimplementasikan melalui penggunaan *website* desa sebagai media pelayanan publik dan sebagai awal digitalisasi pelayanan publik. Selain pemanfaatan *website* desa, Pemerintah Desa Limpung juga melakukan inovasi dengan menggunakan media sosial whatsapp khususnya dalam proses pelayanan publik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai percobaan sebelum aplikasi pelayanan publik terintegrasi diterapkan di Desa Limpung sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Limpung, Bapak Yogi Aditia, S.H., sebagai berikut:

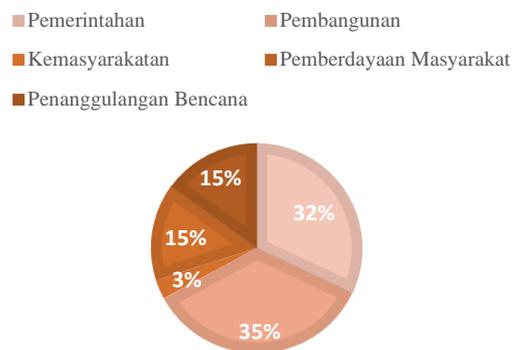
“...Dalam penerapan *smart village* sekarang kami sudah menerapkan media whatsapp sebagai salah satu media pelayanan publik, jadi sebelum masyarakat melakukan permohonan pelayanan publik ke Kantor Desa terlebih dahulu melakukan permohonan melalui whatsapp supaya nanti tinggal menunjukkan bukti (pesan) whatsapp untuk kemudian kami proses.” (Hasil wawancara tanggal 3 November 2022).

Penerapan *smart governance* sudah mulai dikembangkan di Desa Limpung yaitu dengan melalui *website* desa sebagai pusat informasi dan melalui whatsapp sebagai layanan permohonan pelayanan publik. Penggunaan aplikasi whatsapp sebagai platform untuk mengajukan permohonan pelayanan publik disebabkan karena aplikasi ini adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Desa Limpung, serta penggunaannya sebagai cara untuk mengenalkan masyarakat pada digitalisasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar saat aplikasi pelayanan publik terintegrasi diterapkan, masyarakat sudah mengerti proses pelayanan publik secara digital.



Gambar 1. Tampilan Sistem Informasi Desa Limpung

Selanjutnya untuk komponen *smart governance* yang lain adalah terkait pengelolaan dana desa yang penulis tampilkan dalam grafik berikut ini:



Grafik 2. Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Limpung Tahun 2022

Berdasarkan grafik tersebut alokasi dana desa terbesar digelontorkan untuk pembangunan desa. Pembangunan disini bukan hanya terkait pembangunan infrastruktur saja, melainkan pembangunan sistem menuju Limpung *smart village*. Hal ini sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disampaikan oleh *key informan* dan juga *informan* sekunder bahwa saat ini Desa Limpung tengah bersiap untuk menggunakan sistem pelayanan publik terintegrasi dengan dinas – dinas terkait. Selain itu, data yang terdapat pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Menengah Desa) juga memperlihatkan adanya bukti terkait perencanaan pembangunan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi. Pada realisasinya, saat ini Pemerintah Desa Limpung masih melakukan percobaan dengan menggunakan media *whatsapp* agar masyarakat memahami terlebih dahulu terkait digitalisasi pelayanan publik.

Smart Environment dan Smart Economy

Pengembangan *smart environment* serta *smart economy* dilakukan dengan inovasi pengembangan komoditi lokal melalui *one village one product*. Emping melinjo sebagai komoditi lokal Desa Limpung dikembangkan dengan melalui rencana pembuangan limbah industri yang ramah lingkungan yaitu melalui pembuangan limbah terpadu untuk mewujudkan komponen *smart environment*. Selanjutnya juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penjualan produk secara daring melalui *e-commers* serta pemberdayaan masyarakat melalui program *one village one program*. Pemberdayaan ini meliputi sosialisasi penggunaan *e-commers* sebagai media jual beli produk unggulan Desa Limpung yaitu emping melinjo. Proses digitalisasi jual beli produk melalui layanan *e-commers* ini juga menyinggung terkait komponen *smart economy* dimana Pemerintah Desa Limpung berupaya agar komoditas unggulan di Desa Limpung dapat dipasarkan secara lebih luas melalui layanan *e-commers*. Hasil dari adanya sosialisasi terkait digitalisasi penjualan komoditi emping ini adalah berupa peningkatan penjualan emping melinjo secara daring di *e-commerce shopee* kurang lebihnya sebanyak 15% produsen emping di Desa Limpung sudah mulai memasarkan produknya secara daring sebagaimana data yang disampaikan oleh informan kunci yaitu Kepala Desa Limpung.

Smart Mobility

Selanjutnya untuk komponen *smart mobility* diimplementasikan dengan cara penyediaan trotoar bagi pejalan kaki di sepanjang Jl Limpung – Bawang sebagaimana yang tertera gambar dibawah ini.



Gambar 3. Trotoar yang ada di sepanjang Jl Limpung – Bawang

Pemangunan trotoar di sepanjang Jl Limpung – Bawang ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Limpung sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali budaya hidup sehat dikalangan masyarakat dengan berjalan kaki.

Penerapan komponen *smart mobility* sudah mulai berkembang di Desa Limpung yaitu dengan adanya penyediaan trotoar yang merupakan program pembangunan kerjasama antara Pemerintah Desa Limpung dan Pemerintah Kecamatan Limpung. Hal ini dikarenakan trotoar berada di Desa Limpung yang juga berada di Pusat Kecamatan Limpung sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan Limpung. Namun disini, masih terdapat keluhan dari pengguna trotoar dimana selain adanya trotoar, masyarakat memang membutuhkan halte atau perhentian kendaraan umum agar semakin mempermudah mobilisasi masyarakat dan meningkatkan minat penggunaan transportasi umum dikalangan masyarakat Desa Limpung secara luas.

Smart Tourism

Komponen *smart tourism* dilakukan pemerintah Desa Limpung dengan melakukan promosi wisata di Desa Limpung yaitu *street food* di Alun – Alun Kecamatan Limpung yang terletak di Desa Limpung. Hal ini dilakukan sebab di Alun – Alun Kecamatan inilah tempat relokasi dan integrasi pedagang kaki lima (PKL) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Promosi ini dilakukan melalui program *Visit Batang 2022* serta dilakukan peromosi melalui media sosial.

Sejalan dengan hal ini, Wakil Bupati Batang, Suyono mengatakan bahwa renovasi Alun – Alun Limpung merupakan langkah pelayanan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan keindahan, kenyamanan, dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Tak hanya itu renovasi ini juga bertujuan untuk mendukung tahun kunjungan wisata pada 2022 dengan Tagline "*Heaven of Asia*".

"Kita sudah siapkan anggaran untuk renovasi alun-alun mencapai Rp370 juta dan akan ada penambahan lagi di tahun 2020 mencapai Rp200 juta, harapannya Limpung kian ramai dan juga akan tumbuh perekonomian baru di sekitaran wilayah Limpung," (Dikutip dari Laman Resmi Pemerintah Kabupaten Batang).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan komponen *smart village* sudah mulai dikembangkan pada implementasi program *smart village* di Desa Limpung. Pada komponen *smart governance* sudah mulai dikembangkan penggunaan laman resmi (*website*) desa sebagai sumber informasi dan komunikasi baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah dan provinsi. Selain itu, mulai dikembangkan pula pelayanan publik digital melalui media *whatsapp*. Selanjutnya dalam mengembangkan komponen *smart environment* dan *smart economy* dilakukan inovasi pengembangan komoditi lokal yaitu emping melinjo melalui *one village one program* yang mengedepankan penjualan secara daring untuk jangkauan pasar yang lebih luas serta menggunakan pengembangan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya dalam hal *smart tourism* dilakukan pengembangan promosi wisata *night market* dan *street food* di Alun – Alun Kecamatan Limpung melalui berbagai platform media sosial serta penyelenggaraan kegiatan *Limpung fair*. Komponen terakhir yaitu *smart mobility* dilakukan pengembangan dengan melakukan pembangunan sarana transportasi ramah lingkungan berupa pembangunan trotoar yang kemudian pada tahap selanjutnya akan dilakukan perencanaan kembali terkait pengembangan transportasi ramah lingkungan yang akan mendorong penggunaan transportasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta. 2016.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Aditama, Tjandra Yoga. (2014). Jamu dan Kesehatan. 15 April 2018. <http://terbitan.litbang.depkes.go.id/penerbitan/index.php/lpb/catalog/download/159/178/371-1>.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Anderson, James E. (2003). *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Pustaka Setia.
- Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi *Smart Economy* Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju *Smart City*. *Perspektif*, 11(2), 451–459. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5817>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2020). Kecamatan Limpung dalam Angka 2020. Diakses September 2022. <https://batangkab.bps.go.id/publication/2020/09/24/0df6373ae1c1071a663c63fd/kecamatan-limpung-dalam-angka-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2021). Kecamatan Limpung dalam Angka 2021. Diakses September 2022. <https://batangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/0df6373ae1c1071a663c63fd/kecamatan-limpung-dalam-angka-2021.html>.
- Babbie, E. (2011). *The basics of social research* (5th ed.). Belmont : Cengage Learning.
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, Made Heny Urmila, Chafid Fandeli, M. Baiquni. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Patisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistar. The Journal of Social Sciences and Humanities*, 2 (3). 18 April 2018.

- Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Fahrina, A. (2022). Analisis Kesiapan Pembangunan *Smart City* Daerah Studi Kasus: Kabupaten Temanggung. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 984–995. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i2.1901>.
- Guzman, Gustavo. (2009). What is Practical Knowledge?. *Journal of Knowledge Management*, 13 (4), 86-98.
- Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hochschild, J.L., & Einstein, K. L. (2015). 'It Isn't what we Don't know that gives us trouble, It's what we know that Ain't so: misinformation and democratic politics. *Br. J. Political Sci*, 45 (3), 467–475.
- Kustermans, Jorg. (2016). *Parsing the Practice Turn: Practice, Practical Knowledge, Practices*. Millennium: Journal of International Studies.
- Lee, Seonghui & Akitaka, Matsuo. (2018). *Decomposing political knowledge: What is confidence in knowledge and why it matters*. *Electoral Studies*, 51. 1-13.
- Miles, M.B. Huberman, A.M. & Johnny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bupati *Launching Batang Smart City dan Smart Village* (11 November 2018). Diakses pada Agustus 2022 : <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-launching-batang-smart-city-dan-smart-village/>.
- Prasojo. (2018). Introduction to the mini special issue: Understanding Governance in Indonesia. *Journal of Policy Studies*. Volume 39. Page 581-588. Universitas Indonesia.
- Rizkinaswara, L. (20 Januari, 2020). Revolusi Industri 4.0. Didapat dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>
- Rossmann, G.B. and Rallis, S.F. (2012) *Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research*. 3rd Edition, Sage, Los Angeles.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Shabrinawati, A., & Yuliasuti, N. (2020). Komponen *Smart Governance* Berdasarkan Konsep *Smart Village*. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(2), 141. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>.